KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Y3X182KA

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

K							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 4 1 3 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : [15] [6] 8 3 [6] 1 7 [3] [7] 2 8 [0] 0 0							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : TRISNA JUNI ANTO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2	21-402-01	1.341.500	1.341.500	0	5	67.075	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal Z 3 dd D 2 mm Z 0 Z 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Faktur Pajak Tanggal D 2 mm D 2 0 Z 2 yyyyy D 3 dd D 4 Mm D 5 Mm D 7 Mm D							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : 9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 0 C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						TIMUR	
C.3 ID Subunit C	Organisasi :						
C.4 Tanggal	:	2 3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>				
Nama Penandatangan : HARI JUMADI							
C.6 Pernyataan \	Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan b tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	saya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperl	j berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa k	dokumen ini tel	ah ditandatangani secara	